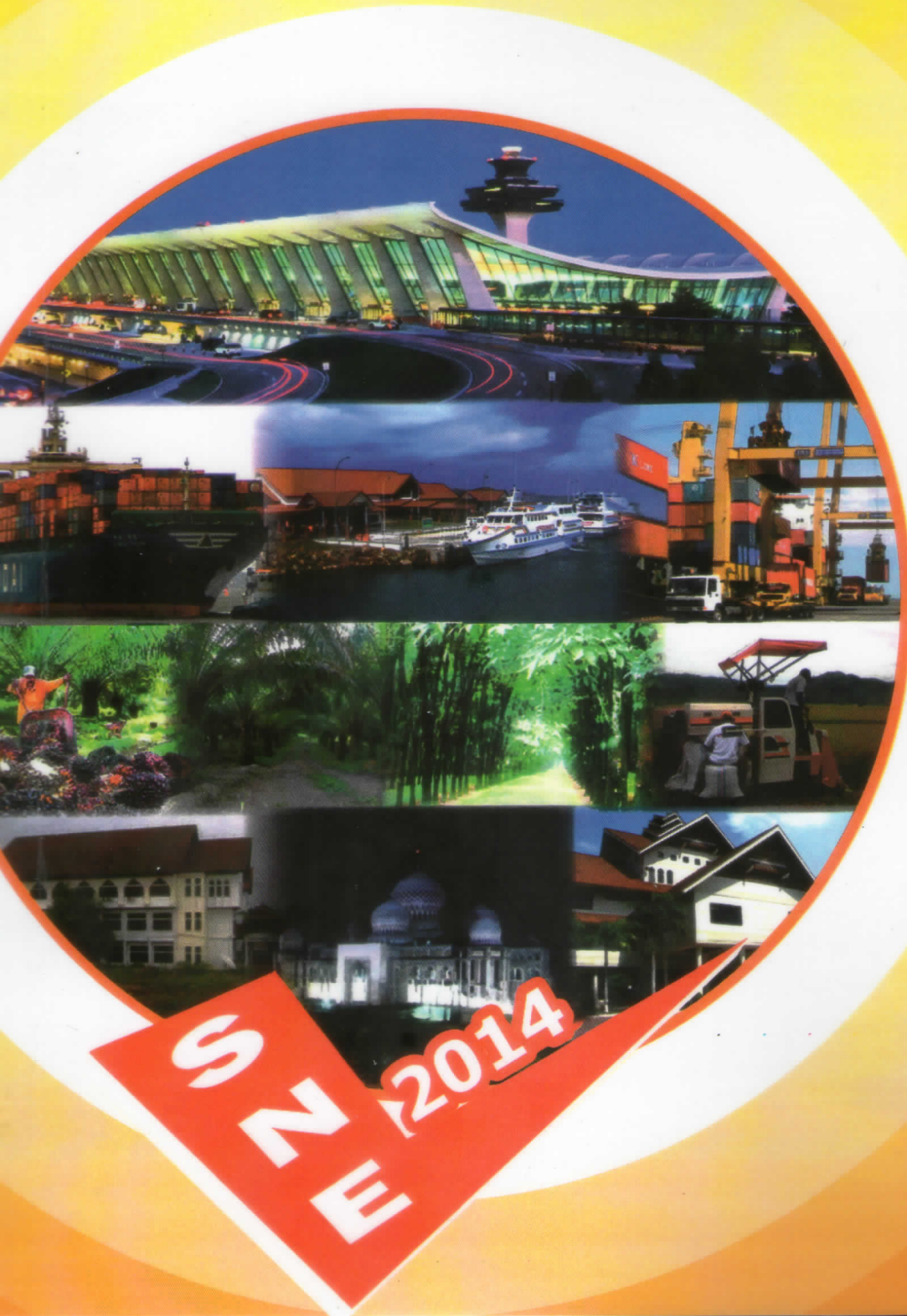


PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI 2014

"Kesiapan Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015"

Lhokseumawe, 18 - 20 November 2014



ISBN: 978-602-14708-1-7



FAKULTAS

Ekonomi

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



SINERGISITAS STAKEHOLDER DAN MANAJEMEN EKOREGION UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAMBANG BATUBARA DI PROVINSI ACEH

Synergistic of Stakeholder and Management Ecoregion for Coal Mine Community Empowerment in Aceh Province¹

M. Sayuti

Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh
(Tgk_sayuti@yahoo.co.uk)

Jullimursyida

Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh
(julli_1876@yahoo.com)

Mariyudi

Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh
(mariyudy@yahoo.com)

Teuku Zulkarnaen

Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh
(teukuzulkarnaen@yahoo.com)

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada pembentukan model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara berbasis sinergisitas *stakeholders* (Pemerintah, Perguruan Tinggi/*Civil Society*/LSM, dan Korporat-CSR). Penelitian ini menggunakan pendekatan metode survey, data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pendekatan partisipatif. Penentuan responden untuk wawancara ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) sebanyak 250 orang untuk setiap stakeholder yang relevan dan masing-masing dianggap mewakili pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini telah merumuskan model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh, guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan mengintegrasikan seluruh elemen yang ada serta melibatkan pilar pelaku pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan akademisi.

Kata Kunci: *Model Pemberdayaan Masyarakat, Tambang Batubara, Sinergisitas, Stakeholder, Manajemen Ekoregion.*

¹ Hasil penelitian PENPRINAS MP3EI, DP2M Dikti Tahun 2014

ABSTRACT

This study focused on the establishment of community empowerment model of coal mine based around the synergy of stakeholders (Government, university / Civil Society / NGOs, and Corporate-CSR). This study used a survey method approach, primary data obtained through interviews directly with the participants. Determination of respondent deliberately determined to interviews (purposive sampling) of 250 people for each relevant stakeholders and each considered representing the stakeholders (stakeholders) regional development. Data analysis methods used in this research is descriptive statistical analysis. The results of this study have been formulated the community empowerment model of coal mine based on the synergy of stakeholders and to drive economic ecoregion management people in Aceh province, in order to encourage sustainable growth by integrating all the elements together and involve the pillars of local government actors, business people, and academics.

Keywords: *Model for Community Empowerment, Coal Mine, Synergistic, Stakeholders, Management Ecoregion*

PENDAHULUAN

Batu bara adalah suatu industri global, dimana batu bara ditambang secara komersial di lebih dari 50 negara dan batu bara digunakan di lebih dari 70 negara. Dunia saat ini mengkonsumsi batu bara sebanyak lebih dari 4050 Juta. Batu bara digunakan diberbagai sektor – termasuk pembangkit listrik, produksi besi dan baja, pabrik semen dan sebagai bahan bakar cair. Perkembangan produksi pertambangan batu bara sebagai sumber energi tak terbaharukan (*non renewable energy resources*) di Indonesia sampai saat ini cukup pesat. Data terakhir hingga tahun 2008 dari statistik batu bara dunia (Sumber: World Coal Statistic/IEA, 2009) menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara pengekspor batu bara nomor 2 di dunia (sebesar 203 juta ton) setelah Australia (sebesar 252 juta ton), bahkan pada tahun 2007 ekspor batu bara Indonesia pernah menduduki peringkat pertama mencapai 164,5 juta ton. Berdasarkan data Badan Geologi tahun 2008, sumber (*resources*) batu bara di Indonesia sebanyak 104,76 miliar ton, selain dijadikan komoditas ekspor ke luar negeri juga menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan di dalam negeri terutama untuk sektor industri seperti: PLTU, semen, industri

tekstil, industri kertas, metelurgi, briket, dan lain-lain dengan jumlah penggunaan mencapai 36 juta ton di tahun 2005 (TekMIRA, 2006; DPPMB, 2006).

Isu tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility-CSR*) sudah cukup lama muncul di negara-negara maju, namun di Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini mengalami perhatian yang cukup intens dari berbagai kalangan. Respons pemerintah terhadap pentingnya CSR ini misalnya terlihat dari dikeluarkannya Kebijakan Pemerintah melalui Kepmen. BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, yang mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Gagasan Model sinergisitas stakeholders ini didasarkan pada fakta bahwa sudah cukup banyak, program/proyek yang dikurcurkan oleh pemerintah, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Candak Kulak (KCK), Supra Insus, Kredit Usaha Kecil (KIK), Kredit Candak Kulak (KCK), Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPSPDMDKE), termasuk dana CSR oleh korporat belum menunjukkan hasil optimal kalau tidak disebut

gagal. Kajian terhadap program-program tersebut menunjukkan bahwa penghantaran sumberdaya finansial (modal) semata tidaklah cukup tanpa dibarengi oleh persiapan sosial yang memadai sebelum bergulirnya sumberdaya modal.

Model sinergisitas stakeholders ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada satu pihakpun yang sanggup secara sendirian menjalankan fungsi yang sangat kompleks dalam upaya pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Model ini juga sangat relevan dengan tuntutan global bagi perusahaan (korporasi) untuk menjalankan *Good Corporate Governance (GCG)*, dengan melibatkan berbagai stakeholder. Bila perusahaan sungguh-sungguh bersedia menyisihkan sebagian keuntungannya (1-5%) saja dari labanya, maka sangat mungkin untuk menghimpun dana program CSR. Pemerintah juga memiliki kelebihan dalam penghantaran finansial dan membuat regulasi terkait dengan implementasi CSR. Sementara itu, Perguruan Tinggi/*Civil Society*/LSM memiliki kelebihan dalam melakukan persiapan sosial. Agar kolaborasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien, dalam relasi antar *stakeholders* dengan masyarakat, harus didasari dengan elemen *social capital* yaitu *trust*. Dalam kondisi masyarakat yang miskin, mempersiapkan masyarakat sebelum penghantaran sumber daya modal (*finansial*) adalah bagian dari proses pemberdayaan (*empowering*). Dalam konteks seperti ini, Model sinergisitas stakeholders menjadi satu alternatif solusi bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Aceh.

Konsumsi energi dapat memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Menekan dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup – termasuk penggunaan energi – merupakan prioritas global. Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan akan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler, berarti jika terjadi perubahan pada lingkungan hidupnya dan meningkatkan risiko bencana maka manusia akan terpengaruh. Penetapan ekoregion memiliki perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjamin perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Propinsi Aceh memiliki sumber energi batu bara potensial yang tersebar di beberapa daerah seperti Meulaboh, Aceh Barat, Singkil, dan Nagan Raya. Sektor pertambangan merupakan sektor terpenting di Propinsi Aceh mengingat peranan sektor tersebut dalam pembentukan PDRB yang mencapai 30,95% (BKPM Aceh, 2012). Praktek *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang selama ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan belum menunjukkan hasil yang signifikan, khususnya bila dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat malah memicu berbagai konflik sosial ekonomi. Pada sisi lain keberadaan tambang batu bara juga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, termasuk erosi tanah, polusi debu, suara dan air, serta dampak terhadap keanekaragaman hayati setempat (World Coal Institute, 2005).

Model berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion sebagai pendekatan yang *holistic* diharapkan dapat menjadi peluang pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dan menggerakkan ekonomi rakyat, sekaligus sebagai salah satu upaya pemberantasan kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kajian ini difokuskan pada pembentukan model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara berbasis sinergisitas *stakeholders* (Pemerintah, Perguruan Tinggi/*Civil Society*/LSM, dan Korporat-CSR) sebagai satu alternatif solusi dalam menggerakkan ekonomi rakyat, pemberantasan kemiskinan, dan sebagai suatu momentum untuk merajut kembali rasa saling percaya (*trust*) dengan memanfaatkan potensi modal sosial yang ada dalam komunitas masyarakat miskin di Provinsi Aceh. Selain itu, penelitian ini juga difokuskan pada pembentukan strategi pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan manajemen ekoregion yang merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup menjadi suatu industri tambang batu bara tanpa merusak lingkungan (*Green Economic*). Dan Merumuskan aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh, serta

merumuskan rekomendasi langkah dan kebijakan yang perlu ditempuh serta memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, mengurangi potensi konflik sosial ekonomi, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Widiyanarti (2005), pendekatan CSR hendaknya dilakukan secara *holistic*, artinya menuju ke arah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat (*community development*). Intinya, bagaimana dengan CSR tersebut masyarakat menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (*sustainability*).

Kotler dan Lee (2005), bahwa pola *Community Development* (CD) merupakan bentuk CSR yang saat ini banyak dipraktikkan oleh perusahaan (korporasi) besar. Dalam implemenetasi CD inilah potensi modal sosial (*social capital*) dapat dimanfaatkan dan didayagunakan. Riset yang dilakukan masih berkisar pada praktik CSR yang sedang berlangsung saat ini, seperti yang dilakukan Saidi (2002); Widiyanarti (2004); Nursahid (2006); Jahya (2006); dan Suprpto (2006). Temuan-temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam implementasi CSR.

Konsep Modal Sosial (*Social Capital*)

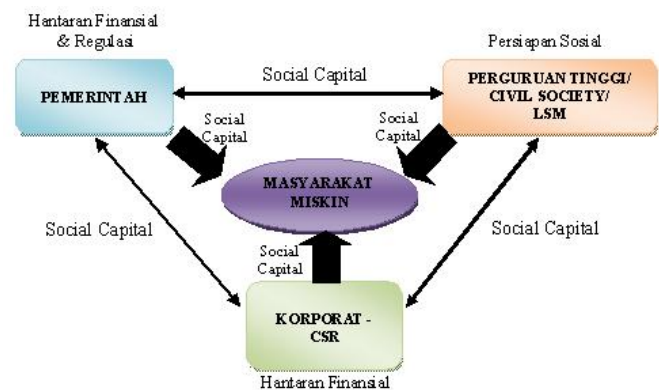
Ibrahim (2006) menyebutkan bahwa hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat, pola hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama atau kegiatan kolektif antar warga masyarakat. Elemen-elemen pokok modal sosial tersebut antara lain adalah: (1) hubungan saling percaya (*trust*); (2) jaringan sosial (*social networks*) (3) pranata (*institutions*); dan (4) resiprositas (pertukaran timbal balik). (Ostrom, 1993; Putnam, 1993; Fukuyama, 1995; Adams & Someswar, 1996; Grootaert, 1998; Pretty & Ward, 1999; Krishna & Uphoff, 1999; Lubis, 2002; Badaruddin, 2006). Beberapa kajian yang menggunakan konsep modal sosial (*social capital*), modal sosial merupakan salah satu prasyarat bagi keberhasilan suatu program pembangunan (Ostrom, 1993; Mackie, 1998;

Rose, 1999). Putnam (1993) dan Fukuyama (1995) menyebutkan bahwa modal social tidak terletak pada individu, tetapi pada kelompok, komunitas, bahkan pada tingkat negara (*state*).

Model Sinergisitas Stakeholder

Studi yang dilakukan Badaruddin (2006) menemukan bahwa salah satu faktor penyebab sulitnya komunitas nelayan tradisional dan nelayan buruh keluar dari perangkap kemiskinan adalah rendahnya atau tidak berkembangnya modal sosial dalam komunitas tersebut. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Ali Wafa (2003), Salman (1999) Fukuyama (1995:26), dan Lubis (2002), Ohama (2001).

Pemerintah juga memiliki kelebihan dalam penghantaran finansial dan membuat regulasi yang terkait dengan implementasi CSR. Sementara itu, Perguruan Tinggi/*Civil Society*/LSM memiliki kelebihan dalam hal melakukan persiapan sosial. Agar sinergisitas tersebut dapat berjalan efektif dan efisien, dalam setiap relasi antar stakeholders dengan masyarakat dan sebaliknya, harus didasari dengan elemen-elemen *social capital* berupa saling percaya (*trust*) (Fukuyama, 1995).



Gambar 1: Model Sinergisitas Stakeholder untuk Pemberdayaan Masyarakat

Manajemen Ekoregion untuk Meningkatkan *Green Economy*

Menurut Siswanto (2005, 31) upaya pelestarian terhadap masalah lingkungan hidup sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang bersifat komperehensif dan menjadi tanggungjawab pemerintah yang didukung partisipasi masyarakat. Bethan (2008, 26-27) menegaskan aspek fundamental yang melandasi

prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu AMDAL. Hasil tersebut juga didukung oleh Munn (dalam Soemartono, 1996), Hardjasoemantri (2009, 252), Zaidun (2008, 27).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Aceh dengan wilayah kajian di Kabupaten Aceh Barat dengan penentuan lokasi *sample* dilakukan secara *purposive* berdasarkan pertimbangan bahwa daerah ini mempunyai potensi sub sektor pertambangan batu bara yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode survey, data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pendekatan partisipatif. Penentuan responden untuk wawancara ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) sebanyak 250 orang untuk setiap stakeholder yang relevan dan masing-masing dianggap mewakili pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, yang terdiri dari kelompok Pemerintahan Daerah yaitu DPRD, Bappeda, Dinas Pertambangan, Disperindagkop, dan Camat; kelompok Pelaku Usaha yaitu Kadinda, Pemilik usaha, Pekerja, dan Perbankan; kelompok Masyarakat Lokal yaitu LSM, Organisasi Keagamaan dan Tokoh Masyarakat serta Media Massa.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Statistik Deskriptif. Data diolah dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, tabulasi silang. Selain itu juga digunakan Analisis Sensivitas Atribut. untuk mengetahui atribut-atribut mana yang berperan memberikan kontribusi terhadap nilai keberkelanjutan sumberdaya. Serta penggunaan Metode *Rapid Assessment for Local Economic Development* (RALED), dan Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Untuk mengkaji karakteristik permasalahan dan potensi yang ada pada masing-masing stakeholder dalam program CSR.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Persepsi Responden terhadap Dampak Kehadiran Tambang Batu Bara

Semenjak adanya indsutri batubara membawa dampak pola perkembangan penduduk di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, selengkapnya rangkuman persepsi responden terhadap keberadaan tambang batu bara PT. Mifa Bersaudara di Kabupaten Meulaboh:

Tabel 1. Rangkuman Persepsi Responden terhadap Keberadaan Perusahaan Batu Bara

No	Keterangan	Dampak		
		Sangat Berdampak	Kurang Berdampak	Tidak Berdampak
1	Pola Perkembangan Penduduk	69,20%	28,00%	2,80%
2	Pola Perpindahan Penduduk	81,60%	17,20%	1,20%
3	Pola Perkembangan Ekonomi	70,40%	24,80%	4,80%
4	Penyerapan Tenaga Kerja	94,80%	5,20%	0,00%
5	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	77,20%	19,20%	3,60%
6	Perubahan Lapangan Kerja	12,00%	62,00%	26,00%
Rata-rata		67,53%	26,07%	6,40%

Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Perkembangan industri disuatu wilayah biasanya melibatkan perubahan sosial yang cepat, dengan komunitas pertanian yang berubah menjadi suatu kota atau kehidupan industri dalam waktu singkat (Webster, 2002). Sementara itu, perubahan pada suatu wilayah tidak hanya karena faktor fisik (mobilitas, jalan dan sebagainya), tetapi juga terkait dengan aspek sosial ekonominya.

Berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, selengkapnya rangkuman hasil analisis yang dilakukan terhadap transformasi sosial ekonomi masyarakat akibat keberadaan tambang batu bara PT. Mifa Bersaudara di Kabupaten Aceh Barat, adalah sebagai berikut:

Pola perkembangan penduduk berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 69,20 % dan diperkuat dengan hasil penghitungan terhadap kepadatan penduduk yang bertambah 254 orang /km².

Pola perpindahan penduduk berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 81,60% dan diperkuat dengan hasil

penghitungan nilai pengaruh dampak industri pada pola perpindahan penduduk sebesar 2,43%.

Pola perkembangan ekonomi berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 70,40 % dan diperkuat dengan hasil penghitungan rasio beban tanggungan berjumlah 7,40%.

Penyerapan tenaga kerja berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 94,80 % dan diperkuat dengan hasil penghitungan nilai pada tingkat partisipasi kerja yang mencapai 53,4% tenaga kerja yang diambil dari penduduk setempat.

Peningkatan pendapatan masyarakat dinyatakan berdampak dengan hasil responden sebesar 77,20 % dan diperkuat dengan hasil penghitungan nilai pada pendapatan masyarakat sebesar Rp 2.500.000.

Perubahan lapangan kerja dinyatakan kurang berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 62,00% dan diperkuat dengan hasil penghitungan nilai pada pendapatan perkapita Rp 7.400.000/ tahun.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Nilai Pengaruh Dampak Keberadaan Perusahaan Batu Bara

No.	Keterangan	Nilai
1	Pola Perkembangan Penduduk	254 orang /km ²
2	Pola Perpindahan Penduduk	2,43%
3	Pola Perkembangan Ekonomi	7,40%
4	Penyerapan Tenaga Kerja	53,4%
5	Berkembangnya struktur ekonomi	7,42%
6	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	2.500.000
7	Perubahan Lapangan Kerja	7.400.000

Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara

Peranserta PT. Mifa Bersaudara

Salah satu peranserta PT. Mifa Bersaudara dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melaksanakan program *Community Development (CD)*. Program CD yang dilakukan meliputi beberapa bidang, yaitu bidang peningkatan pendapatan masyarakat sekitar tambang pada bidang pertanian dan kehutanan, bidang pembinaan pendidikan dan keagamaan, bidang pembinaan sosial-budaya dan bidang penyediaan infrastruktur desa.

Program CD PT. Mifa Bersaudara cenderung dikelola pihak perusahaan sendiri, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Rencana program CD tahunan dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.

Konsentrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA) pada *Community Empowerment* (Pemberdayaan Masyarakat) yang bertitik tolak dari potensi daerah, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh khususnya disekitar tambang. Dimasa mendatang, program PPMA akan dikoordinir pelaksanaannya melalui sebuah yayasan yang dibentuk bersama para *stakeholder*.

Peranserta Masyarakat

Peranserta masyarakat dalam program CD PT. Mifa Bersaudara lebih banyak dalam pelaksanaan program yang dijalankan dari pihak perusahaan. Peranserta mereka pada tahap perencanaan program berupa menyampaikan usulan program baik lisan melalui petugas CD lapangan maupun secara tertulis dengan mengirimkan proposal usulan program ke perusahaan atau mempercayakan aspirasinya kepada pimpinan gampong/tokoh masyarakat. Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Peranserta Pemerintah

Keterlibatan pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terhadap program CD PT. Mifa Bersaudara selama ini masih terbatas pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat mengundang semua pihak swasta untuk mempresentasikan rencana program CD masing-masingnya setiap akhir tahun pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), musyawarah tersebut dihadiri pihak pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa), DPRD dan pihak swasta.

Peranserta Perguruan Tinggi

Kontribusi perguruan tinggi Universitas Teuku Umar (UTU) dalam program CD PT. Mifa Bersaudara terbatas pada tahap perencanaan program. Peranserta pihak perguruan tinggi dengan PT. Mifa Bersaudara dalam hal

pendampingan pelaksanaan program CD, monitoring dan evaluasi program belum ada. Peran serta UTU terhadap pembangunan daerah, berupa kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UTU dengan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.

Peranserta Lembaga Swadaya Masyarakat

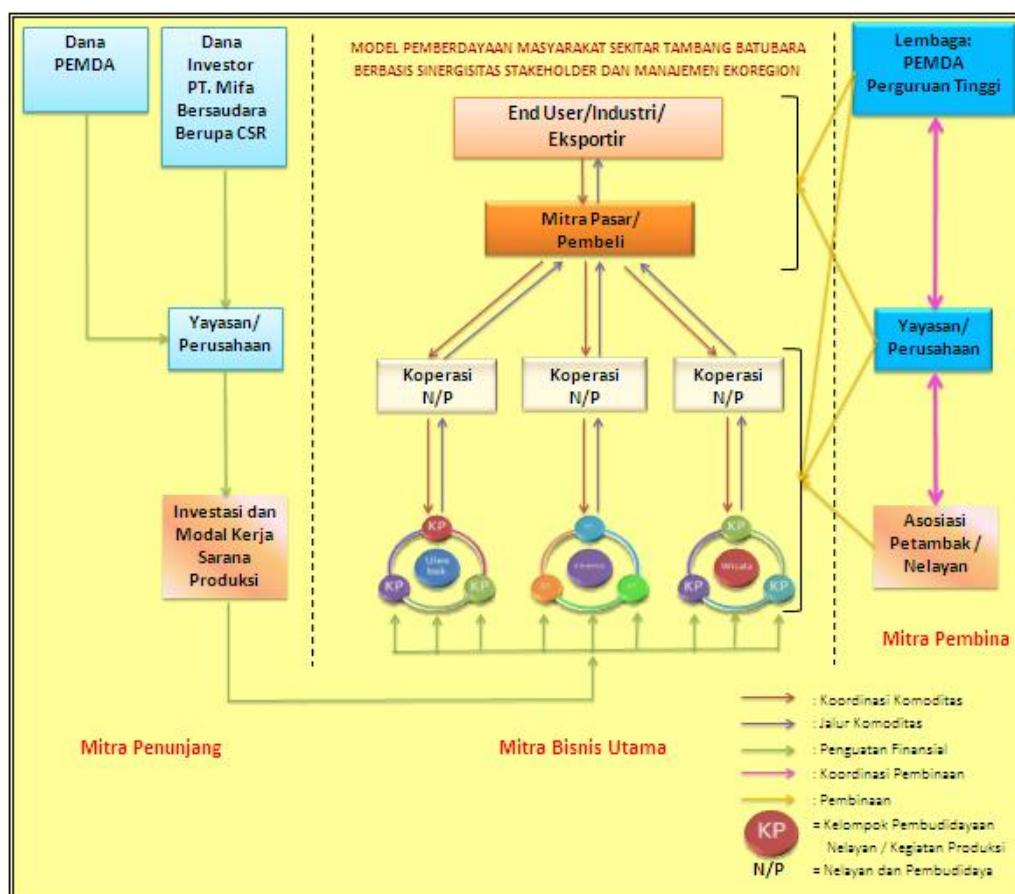
Keterlibatan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam program CD PT. Mifa Bersaudara secara langsung tidak ada. Peranan LSM selama ini lebih banyak pada pembinaan masyarakat untuk menyadari hak- kewajibannya dan memberikan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Wujud pembinaan masyarakat dan kontrol sosial tersebut biasanya disampaikan melalui tulisan di media masa yang memungkinkan semua *stakeholder* mengetahuinya.

Kepada pihak pemerintah, LSM berkontribusi dalam memberikan tanggapan

terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Disamping itu juga, LSM memberikan pandangan aspek sosial-lingkungan kepada DPRD mengenai program pembangunan dalam penyusunan Pembentukan Tata Ruang.

Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder Dan Manajemen Ekoregion disusun sebagai salah satu inisiatif proses sinergisitas kelembagaan, dengan tujuan untuk motivasi masyarakat melalui mengadaptasikan sinergisitas kelembagaan *stakeholder* yang ada. (Roy, 1992 dalam Kolopaking, 2002).

Untuk "menjembatani" perbedaan antara *stakeholder*, potensi konflik dapat ditransformasi menjadi potensi kooperatif yang sinergis (Kolopaking, 2002), maka diperlukan model sebagai berikut:



Gambar 2. Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder Dan Manajemen Ekoregion.

Strategi Mensinergikan Program CD dengan Pembangunan Daerah

Untuk "menjembatani" perbedaan antara kedua kelembagaan pemerintah dengan kelembagaan masyarakat, maka diperlukan prasyarat sebagai berikut (Kolopaking, 2002):

Pertama, dibutuhkan *political-will* pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, antara lain berupa: pengenalan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat; menaruh kepercayaan bahwa identitas, budaya, kebiasaan, tata nilai lokal, dan pengetahuan lokal itu mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap model pengelolaan program CD yang produktif dan lestari; serta memahami masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat yang tinggi, dan dengan demikian patut didengar aspirasinya.

Kedua, setiap aturan formal termasuk sistem insentifnya disusun dengan menengakomodasikan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan model konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah itu percaya kepada masyarakatnya.

Ketiga, setiap tindakan sosialisasi hukum kepada masyarakat tidak dilakukan secara koersif, meski hukum itu sendiri pada hakekatnya bersifat koersif. Sosialisasi hendaknya dipandang sebagai proses pembelajaran yang dialogik. *Keempat*, agar dihasilkan organisasi pemerintahan daerah yang lebih adaptif terhadap kepentingan masyarakat, diperlukan desentralisasi penanganan masalah CD dan devolusi pembuatan keputusan dari tingkat kabupaten ke desa harus diefektifkan.

Kelima, prakarsa pembangunan "jembatan komunikasi" seperti yang dituangkan dalam empat butir pertama, hendaknya datang dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.

Dalam upaya untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat dan mengimplementasikan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka mensinergikan program pengembangan masyarakat dan pembangunan daerah, maka diperlukan strategi kebijakan program pembangunan pemerintah daerah yang mencakup penguatan lembaga dan organisasi

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Haeruman, 2001) dapat ditempuh melalui dua hal, yaitu penguatan lembaga dan organisasi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.

Tahapan Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion

Tahapan awal dalam model ini adalah mengkaji peran serta pihak pemerintah, swasta, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi dalam program *Community Development* (CD) PT. Mifa Bersaudara. Pada pihak pemerintah akan dikaji apakah mereka telah berupaya memaksimalkan layanan, agar interaksi setiap *stakeholder* dalam program CD berjalan baik. Apakah lembaga pemerintah daerah (dinas) dapat menjalankan peran sebagai pembimbing, fasilitator, dan penyuluh teknis sehingga memperoleh kelembagaan lokal yang kokoh yang tumbuh secara alamiah dalam proses pembelajaran.

Pada pihak swasta dikaji apakah mereka menyadari tanggungjawab sosial itu merupakan suatu insentif ataukah beban. Akan dipelajari kinerja manajerial swasta, tindakannya terhadap kelestarian lingkungan, dan sikapnya terhadap masyarakat lokal (pengakomodasian terhadap hak tradisional, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kemanfaatan perusahaan terhadap masyarakat lokal).

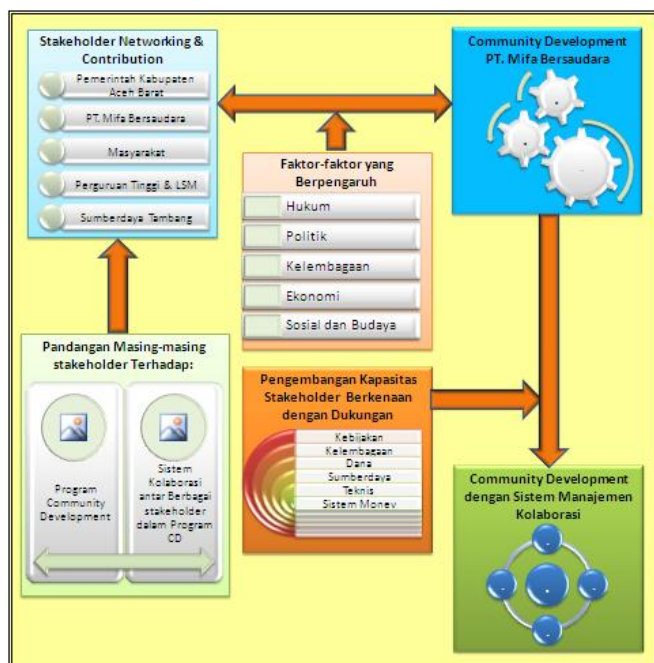
Di pihak masyarakat akan dikaji peranserta mereka dalam program CD PT. Mifa Bersaudara, apakah peranserta masyarakat sudah diikuti dengan kemampuan untuk itu. Bagaimanakah iklim sudah menunjang ke arah tersebut, dapatkah masyarakat merasakan peran pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi program-program partisipatif agar program-program tersebut berkembang dan berkelanjutan.

Di pihak perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan dikaji kepedulian kedua lembaga tersebut terhadap masalah pemberdayaan masyarakat. Fungsi obyektif lembaga ini adalah memaksimalkan layanan akomodatif, korektif, dan suportif agar interaksi *stakeholder* berjalan baik.

Langkah kedua dalam model ini adalah menentukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terjalannya *networking* antara *stakeholder* mempengaruhi keberhasilan program CD. Sehingga dapat memberikan masukan dalam menentukan strategi pembangunan *networking* dalam program CD. Adapun faktor-faktor yang dikaji tersebut antara lain faktor hukum, politik, kelembagaan, ekonomi dan sosial-budaya.

Dalam tahap pengembangan kapasitas *stakeholder* adalah bagaimana mengembangkan kapasitas masing-masing *stakeholder* berkenaan dengan dukungan kebijakan, kelembagaan, dana, sumberdaya, teknis, sistem monitoring dan evaluasi. Masing-masing *stakeholder* dilihat potensi dan permasalahannya untuk berkolaborasi secara efektif dan efisien.

Program CD sebagai program bersama akan dikaji apakah masing-masing *stakeholder* mempunyai tata nilai atau kebiasaan yang mendukung tindakan kooperasi. Sehingga akan dikaji juga apakah pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal siap untuk berdialog dan berkolaborasi.



Gambar 3. Tahapan Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion

Langkah ketiga dari model ini adalah mengetahui pandangan dari masing-masing *stakeholder* terhadap program CD. Pemahaman *stakeholder* terhadap program CD akan mempengaruhi apresiasi dan keterlibatan mereka dalam program. Pandangan yang keliru mengenai peranan *stakeholder* dalam program CD dapat menyebabkan tidak jelasnya tanggungjawab dari masing-masing yang terlibat. Kesamaan pandangan dan kepentingan semua pihak terkait merupakan dasar kolaborasi *stakeholder* dalam program CD. Kerangka pemikiran dalam menerapkan manajemen kolaborasi dalam program CD PT. Mifa Bersaudara ditunjukkan pada Gambar 3.

Pelaksanaan program-program partisipatif tersebut dapat *sustain* dan *survive* apabila didukung dengan kebijakan makro yang mampu "memahami" program-program tersebut dan secara institusional mampu memberikan "insentif" dalam pelaksanaannya. Secara komprehensif, proses implementasi program pengembangan masyarakat perlu didekati dengan "mensinergikan" pendekatan "*bottom up*" (beragam program mikro) dan "*top down*" (kebijakan makro) (Tenny, 2002).

Program CD harus dapat menciptakan "keseimbangan dinamis" dan "dialektis" antara pendekatan "*bottom up*" dan "*top down*". Untuk itu, strategi pengembangan dan peran kelembagaan perlu didekati dengan upaya-upaya "*community based development*" (yang bersifat "*bottom up*") dan pengembangan proses-proses kebijakan di tingkat pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang mampu mendukung dan memfasilitasi *community based development* (CBO) tersebut (Tenny, 2002).

Rancangan Program

Rancangan Program Pemberdayaan Masyarakat

Rancangan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kegiatan pendampingan, melalui beberapa upaya yang diantaranya adalah (Kaswinto, 1999):

Pembentukan dan Pengorganisasian Sistem Kelembagaan. Kegiatan ini diawali dengan pembentukan kelompok-kelompok dampingan oleh pihak pemerintah desa. Melalui mekanisme

kelompok akan dibangun konsensus- konsensus atau komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan komunitas.

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, dilakukan melalui kegiatan- kegiatan pelatihan, belajar bersama, diskusi kelompok, diklat, magang, studi banding, seminar, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan dan instansi terkait lainnya yang dapat juga bekerjasama dengan pihak PT.Mifa Bersaudara dan perguruan tinggi.

Menciptakan dan Mengembangkan Usaha Produktif. Jenis kegiatannya, bisa mengembangkan usaha produktif yang sudah ada, atau membuka bidang usaha baru. Penguatan masyarakat melalui pendekatan ekonomi akan dapat meningkatkan motivasi anggota dalam berkelompok karena sebagian kepentingan mereka dapat terpenuhi.

Mengembangkan Sistem Informasi Masyarakat. Sistem informasi yang dikembangkan akan menjadikan masyarakat mampu mengakses informasi ke dunia luar. Kekuatan masyarakat dalam mengakses informasi, dapat mempengaruhi seluruh aktifitas mereka yang pada akhirnya akan bermuara pada *sustainable* tidaknya komunitas mereka.

Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Pemberdayaan sosial adalah usaha memperoleh akses informasi, pengetahuan, keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial, dan sumber keuangan. Pemberdayaan politik adalah usaha untuk memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri bagi rumah tangga yang Jemah (Wiranto, 2001).

Pemberdayaan Bidang Ekonomi

Dalam rangka membangun perekonomian masyarakat yang kuat, efisien, dan modern, terdapat lima agenda permasalahan yang harus diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, yaitu: *Pertama*, mengoptimalkan peran

pemerintah dalam membangun sektor usaha dan mekanisme pasar yang efisien. *Kedua*, meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam merespon pasar. *Ketiga*, meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan pemasaran output secara efisien. *Keempat*, meningkatkan akses usaha masyarakat ke input produksi (modal, teknologi, lahan, tenaga kerja). *Kelima*, menciptakan keterkaitan usaha besar dengan usaha masyarakat secara sinergis dan setara.

Pemberdayaan Bidang Sosial dan Politik

Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan politik perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Pemberdayaan pada kedua bidang ini mencakup lima program yaitu: (i) peningkatan akses dalam pelayanan sosial dasar, kemampuan keswadayaan masyarakat, dan penyalarsan budaya produktif, (ii) pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik serta dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan, (iii) pengoptimalan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan peningkatan partisipasi masyarakat, dan (iv) pembagian peran dan tanggungjawab antara pemerintah, swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Suatu keterkaitan program pengembangan perkonornian daerah yang efisien hanya dapat terjadi apabila terdapat kerangka kelembagaan untuk mendukungnya. Kerangka kelembagaan mampu mendukung adalah suatu kelembagaan kemitraan (kolaborasi) antara wakil-wakil dari pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat. Dalam hal ini, prakarsa dari pihak swasta diharapkan dapat berperan sebagai penggerak dalam mengidentifikasi dan melaksanakan segenap kegiatan dalam kelembagaan kemitraan yang dibentuk (Sutrisno, Fauzi dan Hariyadi, 2001).

Untuk itu, dalam upaya mengembangkan *networking* dalam program pengembangan ekonomi masyarakat, terdapat empat lembaga ekonomi lokal yang erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal yang harus

dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, yaitu lembaga usaha produksi, lembaga distribusi pemasaran, lembaga usaha/keuangan, dan lembaga keswadayaan masyarakat.

Kelembagaan Lobi dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Untuk mengimplementasikan *Community Based Development* yang berhubungan dalam suatu "keseimbangan dinamis" dengan *Local Government Policies* dalam program CSR, maka perlu dibentuk lembaga kemitraan di setiap tingkatan pemerintahan. Lembaga ini tidak saja berfungsi sebagai "catalist" antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan masyarakatnya.

Rancangan Program Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Dalam upaya membangun *networking* diantara berbagai stakeholder dalam program CSR yang bersinergis dengan program pembangunan daerah, khususnya di bidang ekonomi, maka perlu dibuat strategi kebijakan program pembangunan daerah untuk penguatan lembaga dan organisasi masyarakat. Hal tersebut diupayakan dengan mendukung pembentukan lembaga kemitraan antar stakeholder dan memperkuat lembaga perkoperasian.

Lembaga kemitraan ini juga dapat menjadi dasar dari mengembangkan *networking* ekonomi yang efisien yang menghubungkan antara produsen, pemasok, pedagang, dan pembeli di daerah pedesaan dan perkotaan di seluruh daerah tersebut, bahkan di luar daerah yang bersangkutan

SIMPULAN

Peran serta PT. Mifa Bersaudara dalam upaya mengembangkan masyarakat dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Barat adalah melaksanakan Program Community Development (CD). Keterlibatan pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam program CD PT. Mifa Bersaudara adalah pada tahap perencanaan program CD, pelaksanaan

program dan monitoring program. Peran serta masyarakat pada program CD PT. Mifa Bersaudara lebih banyak pada pelaksanaan program. Peran serta universitas terbatas pada perencanaan program CD. Sedangkan peranserta LSM dalam program CD. PT. Mifa Bersaudara belum ada.

Dalam penyelenggaraan program CD, selama ini PT. Mifa Bersaudara cenderung bekerjasama secara langsung dengan pihak masyarakat tanpa melibatkan stakeholder lainnya. Pola kerjasama lebih bersifat searah, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam penyelenggaraan program CD masih kurang. Belum ada kelembagaan yang menjembatani hubungan keduanya, sehingga keterkaitan program CD PT. Mifa Bersaudara dan program pembangunan daerah relative kecil.

Secara umum, masing-masing pihak terkait memandang penting kolaborasi stakeholder dalam penyelenggaraan program CD. PT. Mifa Bersaudara. Kolaborasi *stakeholder* diperlukan untuk dapat menutup *gap* yang timbul dalam hal tenaga, *expertise*, dana, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pelaksanaan program.

Untuk mendukung kolaborasi diantara *stakeholder*. pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat harus berupaya memaksimalkan layanan.

SARAN

Networking kolaboratif dalam pelaksanaan program CD menuntut perubahan paradigma pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam hal sikap dan orientasinya. Perubahan tersebut menyangkut peran pemerintah daerah yang semula berperan majemuk (mendistribusikan SDA, merencanakan, menentukan regulasi dan mengawasinya) menjadi lembaga yang memberikan dukungan (fasilitas). Dengan kata lain, pemerintah daerah semula menjadi "pengusa tunggal" sekarang menjadi "pelayan".

Begitu juga dengan perubahan sikap menghadapi masyarakat. Masyarakat harus dihadapi sebagai pelaku yang memiliki kedudukan sederajat dengan pemerintah daerah. Sikap ini dituntut dalam setiap pembuatan keputusan, yang semula bersifat unilateral dari

arab pemerintah saja, kini harus bersifat partisipatif. Penentuan kebijakan dan rencana pembangunan daerah secara partisipatif tidak selalu cukup dengan hanya melibatkan DPRD. Pada realitanya, DPRD tidak selalu dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, mesti ada mekanisme yang diatur pihak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat terakomodir dalam setiap program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams and Someshwar. 1996. *Social Capital and Development: Implications for policy and Program*. Paper. Tidak diterbitkan.
- Badaruddin. 2003. *Modal Sosial dan Reduksi Kemiskinan Nelayan di Propinsi Sumatera Utara*. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti. Tidak diterbitkan.
- Baiquni, M. dan Susilawardani. 2002. *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: *ideas dan Trans Media Global Wacana*.
- Briggs, John, and Mwamfupe, Davis. (2000) *Peri-Urban Development in an Era of Structural Adjustment in Africa : The City of Dar es Salaam, Tanzania*. *Urban Studies*, Vol.37, No.4, 797-809.
- Brook, Robert, Davila, Julio. (2000), *The Peri-urban Interface. A Tale of Two Cities* arc.cs.odu, edu :8080/dp9/ getrecord/ oai_dc/eprints.ucl.ac. uk. 0 AI21oai: eprints.ucl.ac. uk .OAI2:40 - 6k -
- Browder, John O. and Bohland, James R. (1990) *Patterns of Development on The Metropolitan Fringe*. *Journal of the American Planning Association*; Summer 95, Vol. 61 Issue 3, p3 !O, 18p, 3 charts.
- Coleman, James S. 1988. *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dasgupta, Partha dan Ismail Serageldin (ed.). 1999. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington: The World Bank.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Kotler, Philip dan Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Kolopaking, Lala. 2002. *Modul Kuliah Pengembangan Masyarakat dan Kelembagaan Pembangunan*. Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah Triwulan I. Pekanbaru, Riau.
- Krishna, Anirudh & Norman Uphoff. 1999. *Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan, India*. *Social Capital Initiative Working Paper. No. 13*. World Bank.
- laquinta, David L., Drescher Axel W. (2000), *Defining Periurban: Understanding Rural-Urban linkages and Their Connection to Institutional Contexts*, presented at the Tenth World Congress, IRSA, Rio, August 1, 2000.
- Mackie, Jamie, 1998. *"Business Success Among Southeast Asian Chinese: The Role of Culture, Values, and Social Structures*.
- Ohama, Yutaka. 2001. *"Conceptual Framework of Participatory Local Social Development (PLSD)*. Modul dalam training on PSLD. Theories and Practices. Nagoya: JICA.
- Pretty, Jules dan Hugh Ward. 1999. *Social Capital and The Environment*. Paper Submitted to World Bank.
- Pusat Sumber Daya Geologi, 2006. <http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/Batubara%20Indonesia.pdf>.
- Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara (TekMIRA), 2006. *Konsumsi Batu Bara Menurut Jenis Industri di Indonesia*. <http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/Batubara%20Indonesia.pdf>
- Rose, Richard. 1999. *"Getting Things Done in an Antomodern Society: Social Capital Networks in Rusia"*. Dalam Partha Dasgupta dan Ismail

- Salman, Darmawan; Laude Sufri; Amin Daud Aidir; dan Mappinawang. 1999. *Kreasi Modal Sosial Melalui Aksi Kolaborasi Dalam Reduksi Kemiskinan*. Makalah Seminar dan Lokakkarya. Makassar: Kerjasama LP3M, FE Unhas dan Oxfarm Jakarta.
- Semendawai, A.H. 2005. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, ELSAM*. Jakarta.
- Serageldin (ed.). *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington: The World Bank.
- Suprpto, Siti Adiprigandari Adiwoso. 2006. Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta. Dalam *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG*. Vol. 1. No. 2.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)* beserta peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB)* beserta peraturan pelaksanaannya.
- Webster, Douglas. (2002), *On the Edge: Shaping the Future of Peri-urban East Asia*, Working paper.
- World Coal Institute, 2005. *Sumber Daya Batu Bara, Tinjauan Lengkap Mengenai Batu Bara*. www.worldcoal.org.